



KONDISI DAN STRATEGI PERTAHANAN MARITIM INDONESIA DI KAWASAN ASIA TENGGARA

Rizky Thesalonika Yulyanti, Mayang A. Parasasti, Amanda M.K. Palar
Posisi: Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Strategi Pertahanan Laut Universitas
Pertahanan
Email: (rizkythesalonika@gmail.com, mayangagnez11@gmail.com,
amandamkpalar@gmail.com)

Abstrak (Palatino Linotype 1 spasi, bahasa Inggris)

Kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang secara geografi sangat strategis dan dapat dipengaruhi langsung oleh kekuatan politik dunia yang lebih besar. Potensi kekayaan alam yang terdapat Asia Tenggara tentunya menjadi target tersendiri bagi pemangku kepentingan untuk memperbesar pengaruhnya. Pengaruh negara besar di Asia seperti Cina ternyata memiliki pengaruh yang luar biasa dalam proses pengambilan keputusan negara ASEAN dalam menjalankan strategi maritimnya. Dari sudut pandang negara ASEAN sendiri perlu adanya tindakan kerjasama antar negara di wilayah regional dengan tujuan untuk mempertahankan pengaruh dan independensi keputusan. Atas dasar inilah dibentuknya ASEAN Maritime Forum (AMF) sebagai wadah negara-negara ASEAN dalam mengambil keputusan dan menentukan strategi dalam bidang maritim

Keywords: ASEAN, Asia Tenggara, Maritim, Strategi

Abstract (Palatino Linotype 1 spasi, bahasa Inggris)

Southeast Asia is an area that is geographically very strategic and can be directly influenced by larger world political forces. The potential for natural wealth in Southeast Asia is certainly a target for stakeholders to increase their influence. The influence of big countries in Asia such as China turned out to have a tremendous influence in the decision-making process of ASEAN countries in carrying out their maritime strategies. From the point of view of ASEAN countries themselves, it is necessary to take cooperative actions between countries in the region with the aim of maintaining the influence and independence of decisions. On this basis, the ASEAN Maritime Forum (AMF) was formed as a forum for ASEAN countries to make decisions and determine strategies in the maritime sector

Kata Kunci: ASEAN, South East Asian, Maritime, Strategy

1. Pendahuluan

Laut adalah sumber daya yang tak terbatas yang telah digunakan sepanjang sejarah manusia untuk transportasi, sumber makanan, rekreasi, pertambangan lepas pantai, dan perdagangan laut, dan sebagai media untuk memproyeksikan kekuatan nasional. Semakin pentingnya lautan di era globalisasi di abad 21 ini ditandai dengan meningkatnya arus perdagangan maritim internasional berdasarkan keunggulan absolut Adam Smith dan keunggulan komparatif menurut David Ricardo (Wahyu, 2016). Perdagangan yang dilakukan dalam skala global menjadi hal yang krusial dengan adanya integrasi pasar dan kerjasama internasional memungkinkan individu, perusahaan, dan negara untuk mendapatkan akses yang lebih cepat dan lebih murah ke pasar di seluruh dunia (Friedman, 1999).

Laut selalu menjadi fokus utama bagi umat manusia dan hubungan internasional. Secara historis, kontribusi laut bagi pembangunan manusia setidaknya dapat dilihat dari empat atribut, yang menurut Geoffrey Till saling terkait dan saling bergantung. Laut menjadi penting bagi sumber daya yang dimilikinya, fungsi laut sebagai sarana transportasi dan perdagangan, laut sebagai sarana pertukaran informasi dan sebagai sumber kekuasaan dan untuk kekuasaan (Till, 2009). Peran yang dimiliki oleh laut ini semakin signifikan di era saat ini karena pertahanan maritim menjadi simbol dari globalisasi terhadap barang-barang atau logistic yang akan didistribusikan, dijual, dan dikonsumsi ke seluruh dunia. Selain itu peluang bagi kita untuk mengeksplorasi laut lebih dalam dikarenakan laut mempunyai banyak informasi yang pada akhirnya menjadi peluang besar bagi manusia untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan kelautan.

Pertahanan maritim terdapat pada dua interaksi pemikiran yang berbeda, yaitu: antara kelompok yang menggunakan kerangka tradisional tentang keamanan maritim dan kelompok yang menggunakan kerangka non-tradisional mengenai konsep keamanan maritim. Pandangan pada kelompok tradisional lebih cenderung untuk membatasi konsep keamanan (*de-securitization*) sedangkan kelompok non-tradisional

memiliki kecenderungan untuk memperluasnya (Buzan, 1990). Jika kita berbicara mengenai keamanan maritim maka tidak dapat dilepaskan dari pemikiran Hoyt dan Buzan yang tentu saja berkaitan dengan keamanan maritim secara non-tradisional maupun tradisional. Seiring dengan perkembangan jaman maka dikeluarkan dokumen oleh Informal Consultative Process yang membahas tentang keamanan maritim secara mendalam. Dokumen tersebut dikeluarkan oleh PBB yang berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB (Resolusi 54/33 1999). Terdapat poin-poin penting dalam dokumen tersebut, yaitu :

1. Tidak ada pernyataan resmi yang berkaitan dengan keamanan maritim pada ICP dikarenakan keamanan maritim sering dianggap berkaitan dengan tindakan kejahatan di laut. Sehingga PBB melaksanakan identifikasi mengenai isu keamanan maritim yang kemudian dihubungkan dengan ancaman yang ada di laut (dalam Makmur) sebagai berikut:
 - Tindakan terorisme yang dilakukan pada kapal dan instalasi lepas pantai.
 - Perompakan yang dilakukan dengan bersenjata serta pembajakan terhadap kapal-kapal yang ada di laut
 - Terjadinya lalu Lalang narkoba secara ilegal
2. Teori mengenai keamanan maritim secara komprehensif dan resmi dijelaskan pada dokumen ICP.

Dengan melihat pada White Defence Papers dan Maritime Policy negara-negara yang kondisi geografisnya berada di kawasan dua Samudra, terutama China, India dan Indonesia, maka negara-negara tersebut harus memperhatikan kondisi maritim dalam rangka mencapai kepentingan nasionalnya. Dari perspektif Indonesia, Presiden Jokowi telah menyebutkan tentang visi menjadi “Global Maritime Fulcrum” yang berangkat dari pemikiran bahwa dalam dunia geo-ekonomi dan geopolitik yang saat ini telah bergeser dari Barat ke Timur dan yang terutama dengan posisi strategis Indonesia, maka laut

Indonesia mengambil peran yang semakin penting (Widodo 2015). Doktrin maritim Indonesia berpegang pada lima pilar: (1) komitmen untuk mendorong pembangunan infrastruktur maritim dan konektivitas laut, (2) komitmen untuk mengembangkan jasa dan industri pengelolaan sumber daya alam laut dan lingkungan laut, (3) mengembangkan kerjasama maritim melalui maritim. diplomasi, (4) membangun kembali budaya maritim Indonesia, dan (5) membangun pertahanan dan keamanan maritim.

Pada akhir 1990-an, terjadi diskusi di ASEAN tentang kerja sama regional di bidang keamanan laut. Deklarasi Hanoi 1998 dan Rencana Aksi 1999 berikutnya untuk memerangi kejahatan lintas batas menunjukkan fokus regional pada pembajakan dan perampokan bersenjata. Pernyataan ini dikeluarkan sebagai tanggapan atas meningkatnya pembajakan dan perampokan bersenjata setelah krisis keuangan Asia 1997. Deklarasi Hanoi hanya menyebutkan perlunya "memperkuat upaya individu dan kolektif" untuk memerangi pembajakan dan kejahatan lintas batas lainnya, tetapi pembajakan menjadi perhatian khusus bagi negara-negara anggota ASEAN. Rencana Aksi juga lintas batas dengan mendirikan Center for Fighting Cross-Border Crime in ASEAN (ACTC) dan menempatkan ASEAN Ministerial Conference on Cross-Border Crime sebagai badan pembuat keputusan politik utama terkait kejahatan.

Namun, sementara tanggapan ini terutama terbatas pada kejahatan lintas batas dan pelanggaran hak cipta termasuk dalam kategori ini, rencana aksi tidak memberikan panduan khusus tentang tanggapan regional terhadap pelanggaran hak cipta. Dalam pengertian ini, keamanan laut masih dilihat dalam arti sempit kejahatan lintas batas, yang harus ditangani secara individual oleh Negara-negara Anggota. Seruan aksi yang lebih spesifik dikeluarkan oleh ARF pada Juni 2003. Pernyataan bersama mencatat sifat sangat penting dan mendasar dari keamanan maritim dan urgensi untuk memperkuat keamanan regional secara ekstensif serta Upaya kerjasama antar instansi penegak hukum maritim terkait. (Nasu et al, 2019).

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Strategi Pertahanan Maritim

Melihat bagaimana pentingnya sebuah negara dalam melakukan strategi pertahanan maritim, tentu hal ini dapat menjadi fokus dalam penyebarluasan pengaruh negara tersebut seperti yang dilakukan oleh Tiongkok yang kini tengah merumuskan strategi maritimnya. Dalam melakukannya, Cina sedang menjalani proses di mana pegawai negeri sipil Cina merumuskan dan memperjelas strategi mereka, memobilisasi lembaga-lembaga negara dan memprioritaskan strategi utama, dalam hal ini tujuan yang ditetapkan dalam rangka pembangunan. Ini karena mereka mengenali kontradiksi yang diciptakan oleh sosialisme Cina, yang masih dalam masa pertumbuhan dan menciptakan kebutuhan materi dan budaya.

Dalam konteks ini, Jalur Sutra Maritim di China dapat diartikan sebagai visi yang memfasilitasi dan dikembangkan dengan menggabungkan kekuatan militer, ekonomi, dan diplomatik untuk menciptakan situasi internasional. Visi tersebut mengacu pada serangkaian proyek infrastruktur yang menghubungkan jalur darat antara China dan Asia Tengah, Rusia dan Eropa, serta jalur laut antara China dan Samudera Hindia melalui Laut China Selatan (CSIS, 2018).

Pada kawasan Asia Tenggara masalah terkait pertahanan maritim diwujudkan dalam bentuk diplomasi pertahanan yang dilakukan secara bilateral dan multilateral (Halkis, 2020). Kerjasama antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara terbagi menjadi empat pola Kerjasama. Pola pertama adalah terkait masalah keamanan tertentu bersama dengan kekuatan eksternal dan negara-negara Kawasan Asia Tenggara dilaksanakan kerjasama pertahanan dalam secara multilateral. Pola kedua yaitu melaksanakan perjanjian dengan mitra strategis dan sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat dalam konteks kerjasama pertahanan dan keamanan wilayah. Pola ketiga yaitu berfokus kepada isu keamanan non-tradisional melakukan kerjasama multilateral dengan negara Asia Timur dalam rangka melibatkan ASEAN di wilayah Asia Timur, dipimpin oleh China. Pola yang terakhir yaitu yang keempat adalah ASEAN sebagai pusat penguatan

kerjasama multilateral keamanan antar negara anggota dan mitra, serta antar negara anggota ASEAN Regional Forum (ARF).

Ancaman yang ada di sektor maritim tidak terlepas dari masalah kedaulatan, sengketa wilayah. Untuk itu perlu dibangun rasa saling percaya agar tidak ada saling curiga dalam kerjasama. Terkait isu kerja sama pertahanan maritim, ancaman kejahatan lintas batas melalui jalur laut tidak hanya menjadi masalah bagi satu negara melainkan menjadi masalah bersama. Penting bagi ASEAN untuk memperluas cakupan pengelolaan keamanan maritim, seperti kerja sama keamanan perbatasan, kerja sama laut lepas, dan kerja sama jalur perdagangan internasional strategis, sebagai komunitas regional yang berfungsi sebagai forum bagi setiap negara anggota (Hendra, 2018).

Berdasarkan pemikiran Liddle Hart, strategi merupakan suatu keterampilan atau seni yang dalam penerapannya menggunakan cara-cara militer dalam rangka mencapai tujuan akhir dari suatu kebijakan (Hart, 1967). Sumber daya dalam pelaksanaan pertahanan laut Indonesia untuk mendukung sistem pertahanan total telah dilaksanakan tetapi belum dapat mencapai kendali mutlak. Dalam buku *Operational Warfare at Sea* yang ditulis oleh Milan Vego (2008) mengenai pengendalian laut maka sumber daya merupakan hal yang paling diperlukan guna mendukung strategi pengendalian laut pada titik tertentu yang mencakup cara, sumber daya, tujuan (Vego, 2008). Dari perspekti sumber daya, dalam penggunaan laut diperlukan Kerjasama antar negara baik secara bilateral ataupun regional. Menggunakan sumber daya laut pada level tertentu memberikan kepada negara yang berada dalam Kawasan laut tersebut untuk menggunakan laut tanpa gangguan dari pihak lain.

3. Metode Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif. Informasi yang dikumpulkan peneliti kualitatif berguna untuk mendapatkan wawasan tentang data yang ingin diperoleh dalam bentuk narasi. Narasi dapat diperoleh melalui wawancara atau melakukan kajian pustaka. Selain dapat pada penelitian kualitatif dapat diperoleh melalui karya seni, audio atau video, jurnalistik, atau bahkan dapat dihasilkan

dari pengamatan yang dekat dan dilakukan secara sistematis terhadap orang-orang atau fenomena yang sedang diteliti.

4. Hasil dan Diskusi

4.1. Kekuatan Militer di Asia Tenggara

Nilai *Global Firepower Index* (GFI) berkaitan dengan kekuatan militer yang dimiliki oleh suatu negara. Poin-poin yang menjadi penentu dalam melakukan penilaian terhadap nilai indeks didasarkan pada sumber daya manusia negara, kekuatan darat, kekuatan laut, kekuatan udara, sumber daya alam, ilmu militer, kondisi keuangan dan geografis, dan merupakan peralatan alutsista utama milik tentara tersebut untuk pertahanan. termasuk (alutsista).

Berdasarkan *World Thermal Power Ranking* 2021, Indonesia (0,2684) menduduki peringkat ke-16 dunia dan peringkat 1 Asia Tenggara setelah Australia (0,3378). Namun, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah untuk memenuhi *Minimum Essential Forces* (MEF) dengan mengoptimalkan penguatan industri pertahanan dalam negeri.

Berikut ini urutan negara berdasarkan GFI di kawasan Asia Tenggara, semakin mendekati 0 dapat diartikan semakin baik kekuatan militernya (dalam Slamet, 2021)

1. Indonesia (0,2684)
2. Australia (0,3378)
3. Vietnam (0,4189)
4. Thailand (0,4427)
5. Myanmar (0,6521)
6. Singapura (0,6931)
7. Malaysia (0,7451)
8. Filipina (0,8219)
9. Kamboja (2,2751)
10. Laos (3,3003)

Sedangkan untuk Brunei Darussalam, Papua Nugini, dan Timor Leste tidak termasuk dalam daftar 140 negara yang diukur global firepower. Beberapa sumber menyebutkan kekuatan militer di ketiga negara tersebut cenderung sangat lemah.

4.2. Alutsista Negara ASEAN

Richard A. Bitzinger dari Universitas Teknologi Nanyang yang merupakan seorang pengamat militer menyatakan sebuah kesimpulan bahwa pasukan pertahanan kemaritiman ASEAN yang sederhana dan pada awalnya berorientasi pada pertahanan di daerah pesisir (brown water) saat ini telah berkembang menjadi angkatan yang lebih modern (green water) (Aqwam, 2017). Angkatan yang lebih modern ini memiliki kemampuan untuk memprediksikan senjata yang diperlukan agar bisa menempuh jarak ribuan mil hingga mencapai wilayah terluar perairan regional. Beberapa jenis kapal seperti kapal korvet, fregat, atau kapal yang lebih besar lagi meliputi kapal selam merupakan alat-alat pertahanan yang erat kaitannya dengan angkatan modern saat ini.

Bitzinger juga beranggapan bahwa sejak tahun 2008 negara-negara di dunia terutama yang berbatasan langsung dengan Kawasan Laut Cina Selatan semakin gencar dalam melakukan modernisasi angkatan pertahanan kemaritimannya Mahroza, (2022). Seperti Malaysia yang menambahkan 6 buah Gowind Class Korvet asal Perancis serta 2 buah kapal fregat F2000 asal Inggris menjadi bagian dari angkatan pertahanan kemaritimannya. Singapura juga mendatangkan 6 buah kapal fregat kelas Formidable dengan desain Lafayette dari negara yang sama yakni Perancis. Sedangkan Vietnam, hingga 2016 lalu, sudah menambah 4 fregat Gepard tipe 3.9 buatan Rusia. Tahun ini, Rusia membantu Vietnam dalam memodernisasi sistem pertahanan rudal Angkatan laut Vietnam pada dua kapal korvet Angkatan Laut Vietnam yakni Moiniya dan Tarantul. Vietnam saat ini menjadi negara dengan Angkatan laut terkuat di antara negara-negara ASEAN 6 (enam) buah kapal selam kelas kilo yang tahun ini dipesan dari Rusia juga sudah beroperasi.

Negara lain yang termasuk agresif dalam modernisasi ini adalah Filipina. Hal ini terlihat dari Tindakan Filipina mendatangkan kapal-kapal fregat dan korvet bekas

berjumlah belasan buah dari Italia, Amerika Serikat, Jepang, dan Italia dalam lima tahun terakhir. Tindakan serupa pun dilakukan Thailand dengan menguasai delapan buah korvet dan tujuh buah fregat serta mencoba menjalin hubungan erat dengan Amerika Serikat dengan tujuan meningkatkan kekuatan armada kerajaan Thai dan menambah jumlah kapal yang kini didominasi kapal-kapal lawas. Salah seorang peneliti senior di HIS yakni Ben Moores mengatakan bahwa negara-negara ASEAN sudah tidak berminat dengan alutsista terkait kemaritiman dari Amerika Serikat, hal ini dikatakan kepada CNBC (dalam Aqwan, 2017). Sebagai contoh, negara Vietnam sejak tahun 2010 telah mengandalkan Rusia dalam pengadaan hampir 72 persen senjata milik mereka.

Indonesia memiliki kontrak sekitar 9,7% dengan Amerika Serikat dari total pembelian dan Malaysia memiliki kontrak sekitar 3,3% dengan Amerika Serikat dari total pembelian. Filipina sebagai negara yang cukup dekat dengan Amerika pun hanya menyediakan 30% untuk industri militer Amerika Serikat. Untuk Singapura yang memiliki persentase belanja militer dengan Amerika Serikat yang cukup tinggi hingga 40% pun melakukan pembelian dengan tujuan menambah skuadron pesawat tempur F-15E, F-16E, dan helikopter Apache bukan bertujuan menguatkan armada laut. Menurut Moores Amerika Serikat kurang menarik bila dibandingkan dengan pemasok alutsista lainnya seperti Inggris, Spanyol, Jepang, Brasil, Korea Selatan, dan Perancis. Berdasarkan Data Global Fire Power, TNI Angkatan Laut Indonesia sendiri saat ini memiliki 24 korvet, 7 fregat, serta 4 kapal selam yang aktif. Beberapa alutsista seperti KRI Gusti Ngurah Rai, KRI Martadinata, dan Kapal Selam Nagapasa memang baru, tapi hampir 70% alutsista TNI saat ini berusia lebih dari 20 (dua puluh) tahun. Sehingga dapat dikatakan bahwa modernisasi alutsista milik TNI AL Indonesia dilakukan secara (Aqwan, 2017).

4.3. Pentingnya Kerjasama Pertahanan Maritim Regional

Namun demikian, maritim regional ini kemitraan dapat menjadi ujian bagi ASEAN kesatuan dan sentralitas. Sebagai daerah organisasi, tugas utama ASEAN adalah untuk mengakomodasi beragam negara anggotanya. minat dan kemampuan. Selain itu, sebagai

aktor terpadu di kawasan, ASEAN perlu menyelaraskan kepentingan negara-negara anggotanya dengan kepentingan kekuatan eksternal. Itu rumit untuk ASEAN terutama setelah mengalami tahun pertama Komunitas ASEAN. Sedemikian Dalam hal ini, negara-negara anggota ASEAN perlu membangun persepsi umum di antara mereka terkait untuk masalah yang saling bertentangan dengan dasar bahwa mereka memiliki kepedulian yang sama pada masalah yang sama. Selain itu, sebagai sebuah organisasi, ASEAN membutuhkan untuk memastikan bahwa masing-masing negara anggotanya kerjasama bilateral dan/atau multilateral dilakukan tidak merugikan negara anggota ASEAN lainnya minat.

Pentingnya dan kerentanan dari Wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur, digabungkan dengan keamanan maritimnya, telah mendesak kekuatan besar di wilayah tersebut untuk meluncurkan masing-masing strategi maritim dan pertahanan yang penting untuk memajukan bangsa kesejahteraan dan keamanan serta regional stabilitas. Sebagai aktor yang bersatu di kawasan, ASEAN juga harus memainkan perannya sesuai tanggung jawabnya dengan melihat kesamaan keprihatinan anggota dan rekan-rekannya. Terkait masalah Laut China Selatan, ASEAN telah melakukan beberapa internal mekanisme untuk menyelesaikan masalah, namun itu gagal mencapai kesepakatan tentang masalah ini. Namun, mekanisme eksternal yang dipimpin ASEAN dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa laut. Ke berbicara sebagai satu aktor bersatu, ASEAN harus menjalankan kepemimpinan dan sentralitasnya dalam Kemitraan Maritim Regional dan Kerjasama, melibatkan negara-negara pasifik lainnya dan mitra ASEAN, terutama Cina, Korea Selatan, Jepang, Australia, Baru Selandia, dan AS Dengan ini, ASEAN membutuhkan lebih banyak langkah membangun kepercayaan untuk membangun persepsi bersama dengan kesamaan keprihatinan di antara negara-negara anggotanya dan untuk memastikan negara-negara anggotanya tidak dirugikan dari bilateral dan/atau multilateral masing-masing kemitraan dengan kekuatan eksternal.

4.4. Kondisi Maritim Masa Sekarang

ASEAN Maritime Forum (AMF) dibentuk dengan harapan Asia tenggara akan lebih serius dalam meningkatkan keamanan laut dikawasan ASEAN terlebih pada daerah choke point melalui kerjasama pertahanan diwilayah laut. Salah satu visi AMF yakni kerjasama kelautan mendapatkan tanggapan-tanggapan positif dari para anggota ASEAN khususnya Negara-negara seperti Indonesia, Singapura, dan Malaysia yang kelangsungan Kerjasama perekonomian terutama perdagangan internasionalnya menggunakan jalur laut. Suatu hal yang pasti bahwa setiap negara memiliki kepentingan masing-masing baik dalam politik, ekonomi dan kepentingan nasional mereka, namun dalam hal penjagaan stabilitas untuk kawasan, wajib dilakukan peningkatan pertahanan bersama oleh setiap Negara sebab hal ini akan mempengaruhi kelancaran setiap kepentingan atau tujuan yang hendak dicapai. ASEAN diharapkan mencegah peluang terjadinya pembajakan dapat menjadi semakin tak terkendali, sarana prasarana maritim yang semakin dipergunakan oleh penjahat dan teroris di laut sehingga ancaman yang terjadi di laut terus meningkat. AMF akan membahas isu lintas sektoral yang berhubungan maritim lalu memberikan saran kepada sektoral terkait. Selain itu AMF akan mendukung percepatan dalam mewujudkan komunitas ASEAN melalui tiga pilar yang berkaitan dengan isu-isu maritim.

Pembentukan AMF dilihat perlu keberadaanya karena bermacam alasan yaitu arti penting wilayah perairan dan laut di Asia Tenggara serta Laut Cina Selatan dalam hal perekonomian. Perdagangan, Transportasi, Komunikasi seluruh negara ASEAN dan kekuatan maritim global. Diperlukan koordinasi dan sinergitas dari ASEAN *sectoral bodies* dikarenakan kawasan Asia Tenggara berpotensi terjadi konflik di laut. Maka hal-hal tersebut dianggap perlu mendapat keseriusan khusus antar negara untuk lebih memperhatikan wilayah maritim di Kawasan Asia Tenggara.

4.5. Maritim ASEAN Di Masa yang Akan Datang

Seiring dengan terjadinya perkembangan ekonomi dan teknologi informasi serta komunikasi maka ancaman terhadap keamanan yang berada di kawasan laut Asia Tenggara juga terus meningkat. Sebagai salah satu pemain kunci, negara-negara anggota ASEAN diharapkan mampu untuk mengembangkan strategi yang dianggap efektif bagi negara anggota dalam mengatasi masalah terkait ancaman keamanan maritim (Admin, 2020). ASEAN menghadapi potensi pembajakan yang lebih kejam, eksploitasi aset maritim yang semakin banyaknya tindakan terorisme, dan peningkatan ancaman terhadap pelayaran. Dalam situasi tertentu, prosedur dan tindakan pencegahan, pencegah, penolakan, deteksi, mitigasi, atau respons dirancang untuk mengurangi ancaman keamanan ke tingkat yang sesuai.

Oleh karena itu, peneliti tentu menantikan untuk melihat masa depan AMF sebagai cerminan dari keprihatinan ASEAN yang lebih luas tentang ketidakstabilan maritim melalui cetak biru strategis yang diusulkan. Metode ini tidak hanya memperkuat kerja sama maritim ASEAN, tetapi juga terus memperbarui isu-isu terkait keamanan maritim ASEAN, menghadapi tantangan baru, dan membuat isu-isu lama keamanan maritim Asia Tenggara menjadi lebih efektif. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, laut merupakan sumber dari berbagai bahaya, terutama mengancam keamanan nasional. Respon yang lebih berhasil terhadap ancaman keamanan maritim membutuhkan kerja sama regional dan tindakan kolektif. Tindakan saja tentu tidak cukup. Dalam dekade berikutnya, kita akan menemukan gerakan kolektif yang luar biasa dalam keamanan maritim ASEAN dan faktor-faktor yang berkontribusi pada tindakan yang lebih kooperatif.



5. Kesimpulan

ASEAN harus lebih mempromosikan dan memberikan perhatian signifikan terhadap kerjasama pertahanan keamanan maritim. Dalam arti yang lebih luas, kerjasama terjadi ketika suatu negara berusaha untuk mencapai tujuannya dan mengubah kebijakannya untuk memenuhi preferensi keamanan negara lain. Kerja sama pertahanan ini dapat diterapkan pada negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Tindakan untuk mengatasi ancaman pada kawasan laut Asia Tenggara dapat dilakukan dengan pengawasan langsung dari pemerintah tingkat strategis melalui personel tingkat menengah di negara-negara ASEAN.

Pertahanan serta keamanan maritim akan terus menjadi perhatian utama ASEAN, terutama karena siklus baru globalisasi akan mengubah cara membangunnya dari laut, kecuali jika ASEAN mempertimbangkan: Jaringan kerja sama keamanan yang mencerminkan status perkembangan isu maritim saat ini. (2) Kepentingan keamanan lokal. (3) Sosialisasi norma dalam kerjasama, (4) Prioritas keamanan maritim, dan (5) Peningkatan, mobilisasi dan penguatan sumber daya nasional. Komunitas Keamanan Politik ASEAN adalah badan yang paling tepat dalam menggaungkan terkait dengan kerja sama pertahanan keamanan maritim negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ASEAN diharapkan mampu untuk meningkatkan rasa keterbukaan serta lebih cepat tanggap dalam mengenali isu pertahanan keamanan maritim dan mewujudkan kerjasama pertahanan maritim yang efektif dan berkelanjutan.



Daftar Pustaka

- Admin. 2012. Asia Tenggara Ramai-ramai Belanja Alat Pertahanan Maritim. <https://www.voaindonesia.com/a/asia-tenggara-ramai-ramai-belanja-alat-pertahanan-maritim/1522260.html>. Diakses pada 25 Juni 2022
- Admin. 2020. Isu Keamanan Maritim Regional. <https://www.tabloiddiplomasi.org/isu-keamanan-maritim-regional/>. Diakses pada 25 Juni 2022
- Aqwam Fiazmi. 2017. ASEAN Mempercanggih Armada, Bersiaga Hadapi Cina. <https://tirto.id/asean-mempercanggih-armada-bersiaga-hadapi-cina-cxP5>. Diakses pada 26 Juni 2022
- Barry Buzan, Waever Ole and de Wilde Jaap. 1990. Security a New Frame Work For Analysis. Colorado : Lynne Reinner Publisher
- Centre for Strategic and InteDiplomasi Pertahanan Maritim: Strategi, Tantangan, dan Prospek nasional Studies. 2018. Jakarta : Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
- Friedman, T.L. 1999. The Lexus and the Olive Tree. New York: Anchor.
- Till, G. 2009. Globalization: implications of and for the modern/post-modern navies of the Asia Pacific.
- Hart, L. 1967. Strategy (Second Rev). Fredrick A. Praeger Publishers. <https://www.classicsofstrategy.com/2016/01/liddell-hart-strategy1954.html>
- Hendra Maujana Saragih. 2018. Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Konflik Laut China Selatan. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi. Vol 8 (1)
- Jonni Mahroza, Priyanto Priyanto, Mhd Halkis, 2022, *Asymmetric Diplomacy And Securitization In The South China Sea* .AJIS, Vol 11, No, 1,
- Makmur Khaliat. 2009. Keamanan Maritim Dan Implikasinya Bagi Indonesia, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol 13 (1)
- M. Halkis, 2020, Filsafat Ilmu Pertahanan Suatu pengantar, (trans. Philosophy of Science on Defense An introduction), Unhan Press, Bogor
- Nasu, H., McLaughlin, R., Rothwell, D. R., & Tan, S. S. 2019. *The Legal Authority of ASEAN as a Security Institution*. Cambridge University Press.
- Slamet. 2021. Kekuatan Alutsista di Kawasan Asia Tenggara. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/peta-tematik/kekuatan-alutsista-di-kawasan-asia-tenggara>. Diakses pada 25 Juni 2022



- Trialen Lumban Gaol. 2017. Peran Asean Maritime Forum (AMF) Dalam Menjaga Keamanan Maritim (Studi Kasus Perompakan Di Perairan Selat Malaka). Jom FISIP Vol 4 (1) 1 – 9
- Vego, M. N. 2008. Operational Warfare at Sea: Theory and Practice (2nd Editio). Routledge. <https://doi.org/0367594943>
- Wahyu Wardhana. 2016. Maritime Fulcrum: A Maritime History And Defense Economy Framework. Jurnal Masyarakat dan Budaya. Vol 18 (3) 369 – 386